

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi Adami, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Gosita Arif, 1987, Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan), IND.HILL-CO, Jakarta
- Hamzah Andi, 2011, Delik-Delik Tertentu (*Special Delicten*) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang. P.A.F dan Theo, 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT. Refika Aditama, Bandung
- Nawawi A.Barda, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2001, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya, Bandung
- Sahetapy J.E., 1987, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Santoso Topo, 1997, Seksualitas Dan Hukum Pidana, IND.HILL-CO, Jakarta
- Wirdjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung

Kamus

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam konsideran

Peraturan Kapolri Nomor Polisi 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana.

Website

Wikipedia Bahasa Indonesia/ Ensiklopedia bebas
(id.wikipedia.org/wiki/pemeriksaan)

[ml.scribd.com/doc/92580899/Pengertian perkosaan](http://ml.scribd.com/doc/92580899/Pengertian_perkosaan)

www.psychologymania.com/2012/09/definisi.perkosaan.html

[lakilakibaru.or.id/2011/11/mitos dan fakta perkosaan](http://lakilakibaru.or.id/2011/11/mitos-dan-fakta-perkosaan)

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2183257-pengertian-korban-tindak-pidana/#ixzz2RFw4KUgQ>

<http://yuantilalata.blogspot.com/2010/10/korban-victim.html>

<http://replaz.blogspot.com/2008/09/viktimologi.html>

[\(http://dinatropika.wordpress.com/2011/10/22/faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-perkosaan/\)](http://dinatropika.wordpress.com/2011/10/22/faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-perkosaan/).

Laporan

Tim Jaringan Pendokumentasian Kekerasan dan Pelanggaran HAM Perempuan Papua 2009-2010, 2010, Stop Sudah Kekerasan dan Pelanggaran HAM Terhadap Perempuan Papua 1963-2009 Edisi Laporan 19 April 2010, Merauke

Tesis

Abdullah Edi, 2008, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Kajian Hukum Normatif), Tesis tidak diterbitkan, Makassar, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

Ira Dwiati, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidanan, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.